

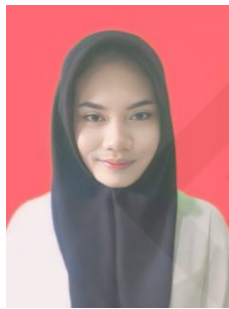
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB P2) UPT PENDAPATAN DAERAH DI WILAYAH KELURAHAN AIR JAMBAK KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada
Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

MAYANG SARI
02170623636

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1445 H/ 2024 M**



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama : MAYANG SARI
Nim : 02170623636
Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Judul Tugas Akhir : MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB-P2) UPT PENDAPATAN DAERAH DI WILAYAH KELURAHAN AIR JAMBAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

Pekanbaru, 1 Juli 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Dr. Khairil Henry, SE, M.Si. Ak

19751129 200801 1 009

MENGETAHUI

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA

NIP.19790911 201101 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan merujuk ke sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengumpulan bahan pustaka, atau kegiatan kepublikan.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

University of Sultan Syarif Kasim Riau



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM

NIP.19700826 199903 2 001



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

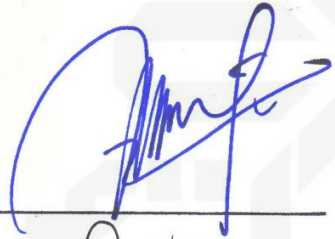
NAMA : MAYANG SARI
NIM : 02170623636
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN (PBB P2) UPT PENDAPATAN DAERAH DI WILAYAH KELURAHAN AIR JAMBAN KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
TANGGAL UJIAN : 27 JUNI 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi., M.A

NIP. 197909112011011003



Sekretaris

Hijratul Aswad, M.Ak

NIP. 198609122020121006



Penguji I

Sahwitri Triandani, S.E., M.Si

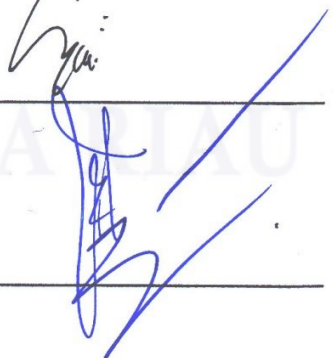
NIP. 198208062006042002



Penguji II

Irien Violinda Anggriani, S.E., M.Si

NIP. 197511062007102003



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MAYANG SARO

Nim : 02170623636

Tempat/Tanggal Lahir : Desa Purworejo / 04 Februari 2009

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Prodi : D3 Adminstrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Mekanisme Pembayaran Pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P-2) Upt Pendapatan Daerah di wilayah Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Juni 2024

.....
membuat pernyataan



NIM : 02170623636 .

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan kependidikan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Dilarang menjiplak atau menyalin atau membuat tiruan atau sejenisnya dengan cara apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

***PAYMENT MECHANISM FOR URBAN AND RURAL LAND
AND BUILDING TAXES (PBB P2) REGIONAL REVENUE UPT
IN THE AIR JAMBAN DISTRICT AREA, MANDAU DISTRICT,
BENGKALIS DISTRICT***

By

Mayang Sari
02170623636

This writing was carried out at the Duri City Regional Revenue UPT, Mandau District, Bengkalis Regency. This research aims to determine the Payment Mechanism for Urban and Rural Land and Building Tax (PBB P2) UPT Regional Revenue in the Air Jamban Village Area, Mandau District, Bengkalis Regency. This writing uses qualitative methods and data and information collection, this writing uses observation, interviews and documentation methods. The data used by the author is primary and secondary data. Land and Building Tax is a type of tax that contributes funds to nation development. Development of the Payment Mechanism for Land and Building Tax in Duri City. The Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bengkalis Regency provides free PBBP2 services in Mandau District. The implementation of this public service is in accordance with Regional Regulation (Perda) Number 02 of 2018 concerning Regency Regional Changes Bengkalis Number 02 of 2013 concerning Urban and Rural Land and Building Tax.

Keywords: PBB P2, Payment Mechanism

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatu

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas seluruh rahmat dan karunianya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) Upt Pendapatan Daerah Di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**. Sholawat beriringkan salam semoga tercurahkan pada junjungan alam yakni kepada Nabi Muhammad SAW .

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis menyadari begitu banyak kendala, namun berkat bantuan dan motivasi, bimbingan dan kerja sama dari berbagai pihak atas ridho Allah SWT segala macam kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyatakan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk orang tua tersayang, Agus sarno dan Ibu Asmaini. Terimakasih banyak karena telah memberikan dukungan yang tak henti-hentinya serta selalu mendo'akan saya, Dan mereka adalah motivasi terbesar setiap hal yang saya jalani, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah memberikan mereka kebahagiaan dunia akhirat, dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan serta tetap menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, Kepada Rati gusmayani S,IP (kakak kandung saya), Vina agustin Dan Vini agustin (adik kandung saya),Niken ayu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

restiani(sahabat beserta teman seperjuangan) karena telah memberikan dorongan semangat yang luar biasa serta selalu mendo'akan untuk kebaikan saya.;

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Ibu Dr. Mahyarni, S.E.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si, Bapak Dr. Mahmuzar., M.Hum, Ibu Dr. Hj.Julina, SE., M.Si, selaku wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universiatas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S.HI., M.A selaku Ketua Prodi D3 Administrasi Perpajakan;
6. Bapak Muslim, S.Sos., M.Si selaku Sekertaris Prodi D3 Administrasi Perpajakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Bapak Dr.Muhammad April, SH M.Hum , selaku penasehat Akademik dan Dr. Khairil Henry, SE,M.Si.Ak selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan nasehat, motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini;
8. Para Dosen Prodi D3 Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga;
9. Ibu Wan Anismah S,H selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang telah memberikan izin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk penulis melakukan penelitian tugas akhir di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau;

10. Seluruh teman-teman D3 Administrasi Perpajakan Angkatan 21 terkhusus kelas B Perpajakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu, dan memberi semangat serta motivasi kepada penulis;
11. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terimakasih.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Segala kritik dan saran akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiin yaa rabbal ‘Alamin.
Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Pekanbaru, 2 Juli 2024

Penulis,

MAYANG SARI
02170623636



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Jenis Data	9
1.7 Metode pengumpulan data	9
1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir	10
BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI	12
2.1 Sejarah singkat berdirinya UPT Pendapatan Daerah Kota Duri.....	12
2.2 Visi dan Misi UPT Pendapatan Daerah Kota Duri	13
2.3 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kota Duri	14
2.4 Tugas dan Fungsi Unit Kerja Tempat Pelaksanaan Penelitian	15
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK	19
3.1 Tinjauan Teori	19
3.1.1 Pengertian Pajak.....	20
3.1.2 Fungsi Pajak.....	20
3.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	20
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak.....	22
3.1.5 Pengelompokan Pajak	23
3.1.6 Sanksi di Bidang Perpajakan.....	24
3.1.7 Pengertian Pajak Daerah	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.8	Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	25
3.1.9	Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	28
3.1.10	Pengertian Wajib Pajak.....	28
3.1.11	Pengelompokan Wajib Pajak	29
3.1.12	Hak Wajib Pajak.....	30
3.1.13	Kewajiban Wajib Pajak	33
3.1.14	Pengertian Mekanisme Pembayaran	34
3.1.15	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan.....	34
3.1.16	Dasar hukum pajak bumi dan bangunan	35
3.1.17	Pengertian Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	36
3.1.18	Pajak Menurut Islam	40
3.2	Tinjauan Praktik	42
3.2.1	Mekanisme Pembayaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	42
3.2.2	Kendala Pajak Bumi dan Bangunan.....	50
3.2.3	Upaya Pajak Bumi dan Bangunan	50
3.2.4	Pendataan jumlah WP dan Realisasi PBB.....	51
BAB IV	PENUTUP.....	54
4.1.	Kesimpulan.....	54
4.2.	Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau 2021-2023	6
Tabel 1.2	Target dan realisasi PBB di Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau 2021-2023	7
Tabel 3.1	Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kelurahan Air Jamban 2021-2023	51
Tabel 3.2	Jumlah Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Mandau 2021-2023	52
Tabel 3.3	Realisasi Pendapatan Wilayah Air Jamban Kecamatan Mandau 2021- 2023	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Upt Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau	14
-------------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Suksesnya suatu pembangunan negara Indonesia tidak terlepas dari suatu tersedianya dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Dengan pengolahan dana yang baik, maka suatu sektor pendapatan negara dapat dioptimalkan untuk mewujudkan cita-cita negara dan meningkatkan pembangunan negara yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak sebagai salah satu sektor pendapatan negara yang sangat besar, telah memberi peran yang sangat penting bagi pembangunan dengan perannya tersebut, maka diperlukan keikutsertaan wajib pajak untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sebagai pencerminan warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku di negara Indonesia.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu komponen pemasukan bagi negara yang potensial terhadap pemasukan negara. Hak pajak bumi dan bangunan ialah objek pajak meliputi bumi dan bangunan yang terletak dalam wilayah NKRI. Meskipun pajak bumi dan bangunan dianggap sebagai sumber pendapatan untuk pembiayaan negara, namun dalam realita, akumulasi pajak masih sulit dilakukan oleh negara, hal ini dikarenakan rendahnya tingkat konsistensi masyarakat dan kepercayaan masyarakat kepada aparat pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak diperlukan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana masyarakat memenuhi semua kewajiban dan kegiatan hak perpajakannya. “Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk pajak bumi dan bangunan. Masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran, sehingga masyarakat yang sadar akan tanggungjawab nya”. Pajak bumi dan bangunan mempunyai dampak yang lebih luas sebab hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan sepenuhnya untuk membangun daerah yang bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan peran pajak bumi dan bangunan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya yaitu melalui peningkatan kesadaran wajib pajaknya. Keberhasilan penerimaan pajak merupakan cerminan kesadaran masyarakat.

Pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah sebagai salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dasar dilakukannya pemungutan oleh pemerintah daerah adalah Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mengatakan bahwa pemerintah dan masyarakat dipersilahkan mengurus rumah tangga sendiri serta bertanggungjawab.

Meskipun pajak disebut sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan negara, namun pada realisasinya pemungutan pajak masih sulit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh negara. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak di Indonesia memerlukan motivasi untuk meningkatkan kepatuhannya untuk membayar pajak, serta peningkatan kepercayaan masyarakat bahwa penyaluran hasil pajak dilakukan sesuai aturan yang berlaku, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, sebagai akibatnya persepsi wajib pajak tentang pembayaran pajak akan positif terhadap pemerintah dalam mengelola pajak yang telah mereka bayarkan.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang wajib dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak. Maka, dalam sistem ini wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, Jika dihubungkan menggunakan ajaran timbulnya utang pajak, maka *Official Assessment System* sesuai dengan timbulnya utang pajak berdasarkan ajaran formil, artinya utang pajak timbul jika sudah ada ketetapan pajak dari fiskus.

Pada struktur pendapatan negara memiliki banyak penerimaan dari berbagai sektor diantaranya sektor minyak dan gas serta sektor non minyak dan gas (misalnya adalah penerimaan dari sektor pajak ,retribusi,hibah,dan lain-lain). Ke-2 sektor sangat strategis dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggung jawaban atas pembangunan dengan cara keikutsertaan pada pembangunan nasional buat mewujudkan rakyat adil dan makmur.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan untuk sektor migas sering mengalami fluktuasi harga yang disebabkan oleh nilai tukar mata uang rupiah yang sangat rentan terhadap kondisi atau keadaan ekonomi baik regional maupun internasional. Oleh karena itu dapat kita lihat untuk penerimaan sektor migas kurang dapat diandalkan secara konsisten. Dalam hal ini pemerintah kemudian berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor non migas dimana hal ini merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah dengan memanfaatkan segala sumber yang ada seefektif dan seefisien mungkin.

Penerimaan non migas yang dirasakan sangat menunjang guna penyediaan dana pembangunan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pembaharuan dan penyempurnaan sistem pemungutan perpajakan yang ada saat ini dirasakan sangat diperlukan apabila melihat keadaan negara saat ini namun tetap memperhatikan asas keadilan. Tingginya tingkat penerimaan pajak menjadi tugas berat bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) untuk dapat merealisasikannya. Partisipasi rakyat dalam membayar pajak akan memudahkan DPJ untuk merealisasikan pajak yang sudah ditetapkan tersebut. Usaha meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak memiliki banyak kendala, antara lain dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, sehingga wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya. Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Semakin baik pertumbuhan ekonominya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat dalam membayar pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Terhambatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu agar pembangunan tidak terhambat maka upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB harus dipacu dan ditingkatkan oleh semua aparat pemungut pajak. Penerimaan PBB dapat ditingkatkan dengan kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kebijakan perpajakan, dan persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan.

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Di Wilayah Air Jamban
Kecamatan Mandau Tahun 2021-2023

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar
1	2021	11.656
2	2022	11.672
3	2023	12.296

Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2024

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 jumlah wajib pajak sebanyak 11.656, dan untuk tahun 2022 jumlah wajib pajak mengalami peningkatan sehingga berjumlah 11.672, kemudian di tahun 2023 jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan sehingga berjumlah 12.296.

Dengan banyaknya jumlah wajib pajak dan adanya peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan, maka target yang sudah ditetapkan oleh UPT Pendapatan Daerah kecamatan Mandau terealisasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2
Target Dan Realisasi Penerimaan PBB Di Wilayah Air Jamban
Kecamatan Mandau Tahun 2021-2023

No	Tahun	Target	Realisasi	Persen
1	2021	1.592.259.902	567.868.366	35,7 %
2	2022	1.521.526.822	655.245.004	43,1 %
3	2023	1.834.450.169	726.360.260	39,6 %

Sumber : Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau 2024

Dari tabel 1.2 dapat diketahui pada tahun 2021 target pajak pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 1.592.259.902 dan yang terealisasi sebesar 567.863.366. Pada tahun berikutnya 2022 target pajak pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 1.521.526.822 dan yang terealisasi sebesar 655.245.004. Tahun 2023 target pajak PBB adalah sebesar 1.834.450.169 dan yang terealisasi sebesar 726.360.260.

Dari data diatas dilihat bahwa pajak bumi dan bangunan memberikan kontribusi dan potensi kepada Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengangkat suatu judul laporan tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan dari program studi D3 Administrasi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul: **“Mekanisme Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) Upt Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja yang menjadi kendala untuk meningkatkan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala untuk meningkatkan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
3. Dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat menambah wawasan bagi peneliti terkait yang diteliti.
2. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak peneliti yang ingin mengkaji secara mendalam tentang pelayanan penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau.
3. Dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi dan saran bagi instansi terkait dalam peningkatan kualitas pelayanan penerimaan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bumi dan bangunan terhadap UPT pendapatan daerah Kecamatan Mandau.

1.5 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau, Jl.Desha Harapan, Air Jamban, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis .

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 24 Januari sampai dengan 26 Januari Tahun 2024.

1.6 Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi melalui wawancara. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai langsung ke kepala bidang.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara seperti dokumen, buku-buku referensi yang berhubungan dengan penulisan.

1.7 Metode pengumpulan data

1. Observasi

Observasi ialah perolehan aktif informasi dan sumber utama. Penulis turun langsung kelapangan untuk mengamati secara dekat permasalahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang diteliti yaitu mengenai Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

2. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto,2006:13). Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berwenang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengambil data dari catatan dokumentasi maupun arsip sesuai dengan yang penulis butuhkan. Dokumentasi diperoleh dari dokumen dan arsip dari tempat penelitian.

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan uraian mengenai apa yang menjadi dasar atau acuan suatu penelitian. Penulisan tugas akhir ini terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan, teknik pengumpulan data dan penulisan laporan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini menjelaskan gambaran umum UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

BAB III TINJAUAN TEORI DAN TINJAUAN PRAKTEK

Bab ini membahas tentang tinjauan teori pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, syarat pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pengelompokan pajak, sanksi dibidang perpajakan, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian kepatuhan wajib pajak, pengertian wajib pajak, pengelompokan wajib pajak, hak wajib pajak, kewajiban wajib pajak, pengertian Mekanisme , pengertian pajak bumi dan bangunan, dasar hukum pajak bumi dan bangunan, pengertian subjek,objek,dasar pengenaan dan tarif, pajak menurut islam,Mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan, kendala, dan upaya, pendataan jumlah wajib pajak dan realisasi pajak bumi dan bangunan kota Duri.

BAB IV PENUTUP

Bab ini yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Kantor UPT Pendapatan Daerah berdirinya Kecamatan Mandau

UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis. Pada awalnya Badan Pendapatan Daerah (BPD) ini juga mengurus retribusi, sampah dan kebersihan pasar. Namun, pada awal tahun 2000 Bapenda dipecah menjadi 2 Badan yaitu: Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pasar.

Badan Pendapatan Daerah mengurus pajak hotel, restoran, hiburan, air tanah, reklame dan sarang burung wallet, penerangan jalan non-PLN, parkir, pajak bumi dan bangunan dan, pajak BPHTB . Sementara Badan pecahannya yaitu Badan pasar focus menangani masalah kebersihan retribusi dari pertamanan dan kebersihan kota.

Pada tahun 2014 pelimpahan wewenang masalah wewenang PBB (Pajak Bumi Bangunan) dikelola oleh UPT Bapenda oleh pusat. Jadi wewenang pemungutan pajak menjadi 7 alternatif pemungutan pajak. Seiring berkembangnya Daerah dipecah lagi menjadi 3 Badan yaitu Badan Perizinan dan penanaman modal BPPT yang khusus menangani pajak retribusi dan penerbitan izin dari macam-macam pajak yang dikelola oleh Bapenda yang dahulunya juga menjadi tugas dari UPT Bapenda. UPT pendapatan daerah menurut peraturan daerah kabupaten Bengkalis No 18 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 17 ayat 2 UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional badan pendapatan daerah dilapangan dan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No 13 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Daerah Kabupaten Bengkalis Pasal 37 Ayat 3 UPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara operasional berkoordinasi dengan camat.

Gambaran Umum Instansi

Nama Kantor : UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau pada Bapenda Kabupaten Bengkalis

Alamat : Jl. Desa Harapan No. 59, Duri.

Telpon : (0765) 91911

Email : UPTD.PBB-P2@GMAIL.COM

2.2 Visi, Misi, dan Motto BAPENDA Kecamatan Mandau.

Adapun yang menjadi visi dan misi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau secara umum adalah sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Pelayanan Yang Prima Kepada Masyarakat Serta Meningkatkan Penerimaan Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan.

2. Misi

Meningkatkan profesionalitas aparatur pelaksana pelayanan PBB-P2,
 Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan PBB-P2,
 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Motto

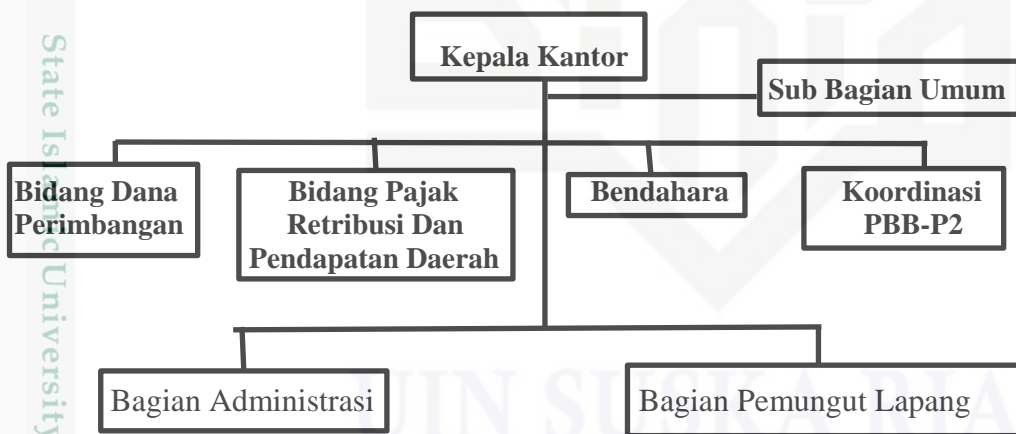
Melayani dengan hati maklumat dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

2.3 Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Struktur organisasi adalah suatu yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dengan tujuan untuk membina kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan teratur dan baik demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis



Sumber: UPT Pendapatan Asli Daerah Kota Duri, Tahun 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Tugas dan Fungsi Unit Kerja BAPENDA Kecamatan Mandau

Berdasarkan struktur organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan mandau dapat dibagi menjadi sebagai berikut :

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau

Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis menyusun suatu struktur organisasi dengan menguraikan beberapa tugas tiap-tiap bagian. Berikut ini adalah uraian tugas dari setiap unit pada UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis.

Tugas Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau itu sendiri:

- a. Melaksanakan evaluasi terhadap kinerja staf.
- b. Melakukan koordinasi dengan bidang dan instansi terkait dalam upaya meningkatkan PAD dan PBB yang dilimpahkan menteri keuangan RI kepada daerah.
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pungutan penerimaan daerah Kabupaten Bengkalis.
- d. Tugas-tugas lainnya yang diarahkan kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.

2. Kepala Sub Bagian tata usaha Dengan uraian tugas:

- a. Membantu kepala UPT Pendapatan Daerah dalam mengelola administrasi umum dan kepegawaian.
- b. Membantu bendahara pembantu penerima administrasi umum pengelolaan penerimaan daerah pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau .
- d. Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan kinerja Badan, laporan akuntabilitas, laporan pelaksanaan kegiatan dinas.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Bidang Dana Perimbangan

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang dana perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada bidang dana perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang dana perimbangan lingkup bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta pajak bumi dan bangunan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya lingkup pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain.

5. Bendahara

- a. Menerima setoran pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Membukukan semua jenis penerimaan pajak/retribusi daerah pada buku penerimaan sejenis dan buku kas umum. Menyetor semua jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan daerah pada kas daerah Kabupaten Bengkalis setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 10.

- c. Tugas-tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan daerah Kecamatan Mandau.

6. Koordinator PBB

- a. Membantu tugas administrasi PBB P2 pada kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.
- b. Membantu tugas kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau dan memantau penyampaian SPPT-PBB desa dan kelurahan.
 - c. Tugas lain yang diarahkan kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau.

7. Bagian administrasi

- a. Laporan bulanan pajak.
- b. Pembukuan penerimaan bulanan.
- c. Pendataan wajib pajak.

8. Petugas pemungut lapangan/harian

- a. Memungut pajak.
- b. Mengantar SPTPD.
- c. Pendataan wajib pajak.

9. Susunan Struktur Organisasi

Berikut susunan organisasi di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Kepala UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Pada Bapenda Kabupaten Bengkalis.
2. Kepala Sub. Bagian tata usaha.
3. Bidang Dana Perimbangan.
4. Bidang Pajak, Retribusi dan pendapatan asli daerah.
5. Bendahara.
6. Koordinator PBB P2.
7. Bagian Administrasi.
8. Petugas pemungut lapangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ada beberapa mekanisme pembayaran yaitu pelaksanaan pemungutan PBB,tata cara pembayaran PBB,tata cara melakukan pembayaran PBB melalui ATM Bank,tata cara melakukan pembayaran PBB melalui e-commerce Tokopedia,serta ada penagihan pajak bumi dan bangunan.
2. Kendala untuk meningkatkan mekanisme pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akibatnya UPT Pendapatan Daerah Kota Duri kesulitan untuk memungut pajak,termasuk pajak bumi dan bangunan. Masyarakat kota Duri bersifat pasif , apalagi prosedur yang dilakukan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) yang diedarkan melalui RW/RW kerumah-rumah warga sehingga membuat warga bersifat “menunggu” dan jarang yang bersifat aktif menanyakan SPPT ke kantor-kantor pemerintah setempat.
3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu atas kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membayar pajak , Upaya yang dilakukan oleh upt pendapatan daerah kecamatan mandau,biasanya para staff anggota lapangan akan sering memberikan penghimbauan kepada masyarakat untuk mengingatkan pembayaran pajak dan memberikan sanksi berupa denda

kepada wajib pajak apabila pembayarannya telah melewati jatuh tempo, agar masyarakat sadar akan kewajiban dalam pembayaran pajak mereka. Selain itu para staff juga mengshare melalui media sosial ketika jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 30 september.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Pentingnya kesadaran Wajib untuk membayar pajak bumi dan bangunan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak tergesa-gesa untuk mengurus keperluan pribadinya dan pelayanan di UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Perkotaan Dan Pedesaan lebih ter-optimalisasi.
2. Sebaiknya UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak tentang sanksi pajak yang belum ditegakkan. Padahal ada konsekuensi bagi wajib pajak jika terlambat melakukan pembayaran PBB, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif berupa denda bagi wajib pajak yang terlambat membayar pajak terutang sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang terutang (Pasal 3 ayat 1 PMK No.78/PMK.03/2016)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Jatmiko (2006). *“Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi”* Kota Semarang. Universitas Diponegoro: Tesis Megister Akuntansi.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi kumadji dan Achmad Husaini.(2015). *“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Tarif Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak”* Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Jurnal Perpajakan (JEJAK) .Vol.6 No.2 tahun 2015
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- A.S. Moenir. 2002” *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.*” Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Atik dan Ratminto. 2012 *“Manajemen Pelayanan”* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muljono Djoko. 2010 *“Panduan Brevet Pajak: PPN, PPnBM, Bea Materai, PBB, BPHTB”* Yogyakarta: ANDI.
- Erawati, Teguh; Parera, Andrea Meylita Widyasti. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus”*.
- Fandi Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2016. *“Layanan, Kualitas & Kepuasan, Edisi 4”* ANDI, Yogyakarta
- Gusfahmi. 2007. *“Pajak Menurut Syariah”* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, Alifa Nur, dkk. 2013, *“Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana (Unud)”* Bali, Indonesia.
- Siahaan, Marihot P, S.E. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Rahayu, Siti Kurnia, 2017 "Perpajakan Konsep dan Aspek Formal", Bandung: Rekayasa Sains

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 2

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2) Upt Pendapatan Daerah Di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah pada Kantor BAPENDA Kota Duri.

Daftar pertanyaan wawancara :

1. Bagaimana mekanisme pembayaran pajak bumi dan bangunan di UPT Pendapatan Daerah Kota Duri?

KA Upt Kota Duri : ada beberapa mekanisme pembayaran yaitu pelaksanaan pemungutan pajak bumi bangunan,tata cara pembayaran PBB,tata cara melakukan pembayaran PBB melalui ATM Bank,tata cara melakukan pembayaran PBB melalui e-commerce Tokopedia,serta ada penagihan pajak bumi dan bangunan.

2. Kendala untuk meningkatkan Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan ?

KA Upt Kota Duri : rendahnya Tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak akibatnya UPT Pendapatan Daerah Kota Duri kesulitan untuk memungut pajak,termasuk pajak bumi dan bangunan. Masyarakat kota duri bersifat pasif , apalagi prosedur yang dilakukan dalam surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) yang diedarkan melalui RW/RW kerumah-rumah warga sehingga membuat warga bersifat “menunggu” dan

jarang yang bersifat aktif menanyakan SPPT ke kantor-kantor pemerintah setempat.

Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

KA Upt Kota Duri : atas kesadaran masyarakat itu sendiri untuk membayar pajak dan Upaya yang dilakukan oleh UPT pendapatan daerah kecamatan mandau, biasanya para staff anggota lapangan akan sering memberikan penghimbauan kepada masyarakat untuk mengingatkan pembayaran pajak dan memberikan sanksi berupa denda kepada wajib pajak apabila pembayarannya telah melewati jatuh tempo , agar masyarakat sadar akan kewajiban dalam pembayaran pajak mereka. Selain itu para staff juga mengshare melalui media sosial ketika jatuh tempo pembayaran pajak yaitu tanggal 30 september.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi wawancara



Dokumentasi di Kantor BAPENDA Kecamatan Mandau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7446/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 14 Desember 2023 M
Sifat : Biasa 1 Jumadil Akhir 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

Kepada
Yth. **Dr. Khairil Henry, SE, M.Si, Ak**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

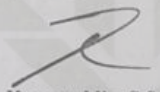
N a m a	: Mayang Sari
NIM	: 02170623636
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Pelayanan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan di kantor UPTD Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"**.

Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga.

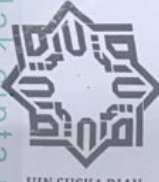

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor	: B-287/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024	Pekanbaru, 08 Januari 2024 M
Sifat	: Biasa	26 Jumadil Akhir 1445 H
Lampiran	: -	
Hal	: Izin Penelitian	

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

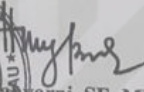
Nama	: Mayang Sari
NIM	: 02170623636
Jurusan	: D-III Perpajakan
Semester	: V (Lima)


bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan di Kantor UPTD Badan Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Perkotaan (M Pr)

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,


 Dr. Mayarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
UPT PENDAPATAN DAERAH
KECAMATAN MANDAU
 JL. DESA HARAPAN No. 59 TELP. (0765) 91911 DURI

Duri, 19 Februari 2024

Nomor : 953/UPTD/2024/031
 Sifat : Umum
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
 dan Ilmu Sosial
 Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau
 di -
 Tempat

Berdasarkan surat Saudara Nomor B-287/ Un.04/F.VII/PP.009/1/2024 Perihal
 izin Praktek Kerja Lapangan atas nama :

Nama : Mayang Sari
 NIM : 02170623636
 Program Studi : D3 Perpajakan

Berhubungan dengan hal diatas kami UPTD Pendapatan Daerah Kecamatan
 Mandau Memberi Izin Kepada Mahasiswa tersebut untuk melakukan Penelitian di
 Kantor UPT Pendapatan Daerah Kecamatan Mandau. Sesuai dengan waktu yang telah
 ditentukan .

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


 KEPALA UPT PENDAPATAN DAERAH
 KECAMATAN MANDAU
 WAN ANISMAH, SH
 NIP. 19731114 200701 2 003

UIN SUSKA RIAU



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Mayang Sari dilahirkan di Desa Purworejo, 14 Februari 2004. Penulis merupakan Putri kedua dari 6 bersaudara dari Bapak Agus Sarno dan Ibu Asmaini . Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di Mi Al-Muhajirin Desa Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, dan lulus pada Tahun 2015. Setelah itu, penulis melanjutkan ke Pesantren Al-Jauhar boarding school kemudian pindah sekolah di kelas 11 ke SMP Negeri 1 Pinggir Desa Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis dan lulus pada Tahun 2018. Kemudian, penulis melanjutkan ke SMA Negeri 1 Pinggir Desa Muara Basung Kec.Pinggir Kab.Bengkalis, dan lulus pada Tahun 2021. Pada tahun yang sama penulis diterima di Perguruan Tinggi yang ada di Pekanbaru yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) melalui jalur Ujian Mandiri, Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan Program Studi D3 Administrasi Perpajakan. Penulis Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Sumatera Barat pada semester 5. Penulis Melaksanakan Penelitian pada tanggal 24 Januari s/d 26 Januari 2024 di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Duri Kec.Mandau dengan judul “Pelayanan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) UPT Pendapatan Daerah di Wilayah Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis” dibawah bimbingan Bapak Dr. Khairil Henry, SE,M.Si.Ak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.